

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat sebagai warga negara. Sedari dini, kita telah diberikan pendidikan tentang arti penting politik itu sendiri baik dari pelajaran di sekolah maupun pada lingkungan keluarga. Karena pada dasarnya, pemahaman perihal politik tidak hanya sekadar memilih calon A maupun B tapi politik punya arti yang sangat luas dan banyak maknanya bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini banyak sekali masyarakat yang masih buta terhadap pendidikan politik, masyarakat sekarang kerap berpikir bahwa politik itu hanya urusan pemerintah dan elit-elit tertentu. Dampak dari sikap apatis tersebut adalah banyak dari mereka yang gampang untuk dibohongi pada saat pemilu, banyak mereka yang sekadar ikut-ikutan saja tanpa mengetahui visi dan misi pasangan calon yang berkontestasi.

Perlu ditekankan bahwa, masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik bukan berarti mereka masuk ke golongan partai tertentu atau bagian dari golongan tertentu. Mereka yang berkeinginan untuk belajar tentang arti lebih politik disini telah menyadari tentang kewajibannya sebagai masyarakat yang cerdas dan juga telah menyadari perannya sebagai warga negara. Di zaman demokrasi seperti sekarang ini, pendidikan politik sangat diperlukan dikarenakan tuntutan demokrasi itu sendiri. Sebab demokrasi sendiri bukan hanya membuat politik di suatu

negara menjadi stabil, namun juga memberikan harapan baru. Pendidikan politik itu tidak hanya ditujukan melalui perubahan-perubahan sikap politik seseorang saja, tetapi bisa juga untuk mendukung usaha-usaha untuk memperbaharui institusi kemasyarakatan maupun lembaga politik.

Partai politik mempunyai tugas utama, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang mengenai politik yang didasari dengan transparansi terkait personal calon yang akan masyarakat pilih pada pemilu. Tidak itu saja, dalam pemahaman mengenai partai politik, hal yang paling penting dalam memahaminya ialah partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang usianya telah dinyatakan sebagai calon daftar pemilih agar ikut andil dalam melakukan proses pemilihan umum. Kemudian memahami pula akan berartinya suara mereka yang akan merubah nasib untuk beberapa dekade tentu saja dengan pengharapan dapat memunculkan masyarakat-masyarakat yang bersifat partisipan.

Partai Politik sendiri Menurut pasal 1 angka 1 UU no. 2 tahun 2011 tentang partai politik yaitu partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²

Sehingga partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalanya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal. Kecenderungan itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat memunculkan kehidupan berorganisasi guna memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan dari individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Dengan demikian peran partai politik yang begitu besar dan strategis menjadikan partai politik yang sebelumnya di remehkan dan dianggap sebagai tempat berlabuhnya orang-orang tersisih dari persaingan saat ini justru menjadi rebutan orang-orang yang berpengaruh dan berpendidikan tinggi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008,³ tentang partai politik dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan tentang fungsi dari partai politik itu sendiri, yaitu pendidikan politik. Partai politik bertanggung jawab dalam memberikan pembelajaran terhadap warga negara dalam memahami dan mempunyai hak atas politik. Disebutkan juga dalam UU No. 2 tahun 2011⁴ sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juga disebutkan tentang partai politik antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan demokrasi.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (4) tentang Partai Politik

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Menurut peneliti, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hal dirinya ikut terlibat dalam politik suatu negara. Karena, partai politik merupakan suatu lembaga politik yang bisa dikatakan sangat dekat untuk merangkul masyarakat. Masyarakat bisa menjelaskan tentang kekhawatiran politiknya ke partai politik pilihannya. Partai Politik juga merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang demokratis untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab Partai Politik merupakan wadah bagi masyarakat yang mengekspresikan serta mengaktualisasikan haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana di sebutkan dalam pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat

Tujuan pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat mempunyai wawasan yang lebih luas tentang hal yang terkait dengan kebebasan demokrasi.⁵ Namun demikian sampai saat ini peran Partai Politik tersebut dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat belum bisa dirasakan secara maksimal kepada seluruh warga Indonesia, dan begitu pula yang terjadi di kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Masih kurangnya pemahaman masyarakat secara politik telah menyebabkan mereka

⁵ Azed, & Amir, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*, (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2006), hal. 15

cenderung pasif, dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari para elit politik.

Lebih dari itu mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Pada hal ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses pilkada di wilayah Kabupaten Trenggalek yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari masyarakat kabupaten Trenggalek. Otonom ini hanya dapat dimungkinkan jika masyarakat Kabupaten Trenggalek cukup tahu pemahaman tentang politik. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Trenggalek juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya hak pilih. Mengingat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Trenggalek juga masih dibawah dari standar nasional, tentu hal ini juga dipengaruhi mengenai pemahaman politik masyarakat Trenggalek

Sherman dan Kolker sebagaimana yang di kutip oleh Affandi bahwa: “Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, suatu proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari budaya tersebut sebagai unsur yang penting dalam konsep dirinya. Sebagai proses pembudayaan, pendidikan politik terkait dengan nilai, kepercayaan, dan pola perilaku yang dipelajari pada usia awal yang membentuk sifat dasar seseorang”.⁶

Pengetahuan politik akan membawa seseorang pada tingkat partisipasi tertentu, pengetahuan politik yang mumpuni akan membuat seseorang dapat lebih aktif dalam bidang politik begitu pun sebaliknya. Dalam sistem politik

⁶ Affandi, *Pendidikan Politik*, (Bandung: Mutiara Press, 2012), hal. 23

tidak cukup hanya berdimensi pengetahuan, tetapi lebih merupakan paduan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan bersama-sama. Ketiga hal tersebutlah yang dianggap sebagai nyawa dari melek politik warga negara.

Affandi menguraikan indikasi melek politik dilihat dari tiga aspek yang merupakan hasil dari pendidikan politik. Dari aspek pengetahuan, seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik apabila sekurang-kurangnya menguasai tentang:

1. Informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan, dari mana uang berasal, bagaimana sebuah institusi bekerja,
2. Bagaimana melibatkan diri secara aktif dalam memanfaatkan pengetahuan,
3. Kemampuan memprediksi secara efektif bagaimana cara memutuskan sebuah isu,
4. Kemampuan mengenal tujuan kebijakan secara baik yang dapat dicapai ketika isu (masalah) telah terpecahkan,
5. Kemampuan memahami pandangan orang lain dan membenarkan mereka tentang tindakan dirinya sendiri.⁷

Aspek itulah yang membentuk sadar politik paling tidak berkenaan dengan sikap tentang kebebasan, toleransi, fair, menghargai kebenaran, menghargai pemikiran, dan aspek lain, yang biasa disebut nilai prosedural. Sedangkan dari aspek keterampilan seseorang dikatakan melek politik jika ia tidak hanya berperan sebagai penonton yang baik, tetapi mereka mampu

⁷ *Ibid.*, hal. 27

berpartisiasiaaktif atau bahkan menolak secara positif. Seseorang yang meleak politik pun memiliki toleransi terhadap pandangan orang lain dan dapat memikirkan perubahan dan bagaimana metode yang tepat untuk menguasainya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendidikan politik memiliki arti penting dalam pembentukan pengetahuan, sikap, hingga skill yang berujung pada partisipasi warga negara.

Untuk mengetahui pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Trenggalek, peneliti akan memfokuskan penelitian disalah satu parpol yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB merupakan partai yang memiliki kursi legislatif terbanyak di Kabupaten Trenggalek dengan menduduki 11 Kursi, disusul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 9 kursi, Partai Golkar 6 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6 kursi, Partai Demokrat 5 kursi, Partai Gerindra 3 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 2 kursi, Partai Hanura 2 kursi, dan 1 kursi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁸

Dengan banyaknya suara yang dimiliki PKB perannya dalam melakukan pendidikan politik haruslah besar dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan politik sesuai yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendidikan politik bagi masyarakat oleh PKB sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan politiknya secara cerdas dan menjamin kualitas hasil pilkada. Dalam konteks pranata masyarakat modern yang demokratis, pilkada merupakan alat legal formal bagi rakyat untuk memilih wakil yang mempresentasikan kepentingannya. Memilih dan dipilih

⁸<https://kpu-trenggalekkab.go.id/index.php/1342-inilah-perolehan-kursi-di-dprd-kabupaten-trenggalek-oleh-9-partai-politik> di akses pada 29 Juli 2021 pukul 16.00 WIB

merupakan salah satu hak asasi bagi manusia , untuk itu partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang ideal memberikan pendidikan politik dan mencerahkan kepada rakyat sebagai konstituennya.

Pentingnya pendidikan politik yang harus dilaksanakan oleh Partai PKB secara maksimal dan pada esensi yang sebenarnya akan dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat, maksudnya masyarakat mampu menjadi orang yang sadar akan kewajiban mereka serta yang paling penting dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu masyarakat menjadi sadar dan menjadi orang yang cerdas dalam memberikan pilihan kepada PKB atau calon yang benar dan tulus dalam kesejahteraan rakyat.⁹ Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilakukan secara nonformal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek?

⁹ Wawancara dengan bapak Amin Tohari pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 14.44 WIB

2. Bagaimana pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek Prespektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
3. Bagaimana pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek Prespektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian karya ini untuk mengungkap tentang :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek dalam Prespektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Untuk menganalisis bagaimana pendidikan politik bagi masyarakat oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek dalam prespektif Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis (Keilmuan)
 - a. Membantu dan Memberikan sumbangan pemikiran kepada para

akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan pendidikan politik.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan juga dapat dijadikan tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang kaitannya dengan pendidikan politik bagi masyarakat.

2. Kegunaan dari segi praktis

a. Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan guna sebagai referensi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait pendidikan politik khususnya wilayah Kabupaten Trenggalek.

b. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PKB dalam melakukan pendidikan politik khususnya di Kabupate Trenggalek.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan politik serta kesadaran agar perpolitikan semakin baik.

d. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pendidikan politik

Pendidikan Politik, sebagaimana di jelaskan Pendidikan politik memiliki misi yang cukup penting dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya politik bagi kehidupan. Hakikat Pendidikan politik dalam prespektif Rifai adalah Pendidikan Politik sebuah kajian yang mencoba memberikan tawaran ide, wacana, dan transformasi kepada generasi mendatang tentang dunia politik yang berkaitan dengan kekuasaan, dan pengolaan kebijakan publik, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan untuk kepentingan umum.¹⁰

b. Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tergolong merupakan partai dengan ideologi yang unik. Meski secara kelembagaan partai ini secara jelas mencantumkan Pancasila sebagai asas partai, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kelahiran PKB dibidani oleh organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama

¹⁰ Sutrisman Dudih, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa* (Bandung: Guepedia, 2018), hal. 12

(NU). Kompromi antara identitas sebagai partai politik yang nasionalis dengan latar belakang historis menjadi kata kunci dalam memahami PKB Dalam pasal 3 Anggaran Dasar PKB ditegaskan; bahwa partai ini berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sementara, pada pasal 4 PKB menegaskan bahwa yang menjadi prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan per-saudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlusunnah Waljama'ah*.⁴

Sebagai partai yang dibidani oleh NU, maka struktur kepengurusan juga nyaris sama dengan organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 1926 tersebut. Dalam pasal 16 dijelaskan mengenai hal ini. Susunan kepengurusan PKB di masing-masing tingkatan organisasi partai terdiri dari (1) Mustasyar, (2) Dewan Syura, dan (3) Dewan Tanfidz. Mustasyar, seperti dijelaskan pada pasal 17 adalah penasihat partai baik diminta maupun tidak, memberikan nasihat-nasihat organisasi kepada Dewan Syura dan Tanfidz. Sementara, Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan menetapkan kebijakan umum partai, sedang

Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek“ yaitu penelitian yang mengkaji tentang pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Trenggalek. Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Trenggalek kemudian dikaji dengan undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik dan juga *Fiqih Siyasah*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adaya sistematika penulisan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait

dengan Pendidikan Politik, Partai Politik, Regulasi Partai Politik, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Politik Dalam Islam.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *Field reasearch*. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Tenemuan Penelitian, pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkanakan digabung serta

dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.dimana akan dibagi dalam benrtuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Trenggalek. Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.